

SEKULARISME DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Nurul Farhanah Binti Masri

Fakulti Bahasa, Tamadun dan Falsafah
Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia
email: anafarhanah058@gmail.com

Abstract

The majority of the population of Malaysia is Muslim. However, Islam does not regulate all aspects of state life in this country. The education aspect, for example, is more directed to the western education system and model than the Islamic education system, as well as in the Malaysian state government and political system. The purpose of this study is to classify the idea of secularism that is applied in policy or development in Malaysia, especially in the field of education. This research is a field research, using interviews, observation and documentation as data collection techniques. The results of this study indicate that the Malaysian state has implemented secularism in the government system in Malaysia. This is due to the influence of British colonialism which replaced the model of government based on Malay culture into a democratic system of government, political, social, economic and educational systems. This resulted in the Islamic model slowly starting to be erased, especially in education.

Keywords: Secularism, education, Malaysia

Abstrak

Mayoritas penduduk negara Malaysia menganut agama Islam. Namun tidak semua aspek kehidupan bernegara di negara ini dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam. Aspek pendidikan misalnya, sistem pendidikan lebih mengarah pada model dan sistem pendidikan barat dan tidak menganut pada sistem pendidikan Islam, begitu juga dalam sistem pemerintahan dan politik negara Malaysia. Tujuan penelitian ini juga untuk mengklasifikasikan tentang ide sekularisme yang diterapkan dalam kebijakan atau pembangunan di Malaysia khususnya dibidang pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara Malaysia telah menerapkan sekularisme dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Hal ini disebabkan oleh pengaruh penjajahan Inggris yang menggantikan model pemerintahan yang berbasis pada budaya melayu menjadi sistem demokrasi sistem pemerintahan, politik, sosial, ekonomi dan pendidikan. Hal ini mengakibatkan secara perlahan model islami mulai terhapus khususnya dalam pendidikan.

Kata kunci: Sekularisme, Pendidikan, Malaysia

A. Pendahuluan

Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat yang sangat beragam jika dilihat dari segi ras, etnis, bangsa dan agama. Malaysia telah menjadi negara yang sangat multi bangsa sebagian penduduknya adalah orang Cina, India maupun

Indonesia. Meskipun demikian, jika dilihat dari penganut agama, mayoritas penduduk Malaysia beragama Islam, menariknya lagi, seperti Indonesia meskipun mayoritas masyarakatnya bergama Islam tidak lantas membuat negara ini menjadi negara Islam yang menjadikan agama sebagai landasan berbangsa dan beragama (Mohd Anuar Ramli, 2013).

Berdasarkan data statistik dari Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2021, penduduk Malaysia yang beragama Islam berjumlah 69.7%, Buddha (17.6%), Kristian (8.2%), Hindu (6.0%), Konfusianisme, Tao dan agama tradisi Cina (1.2%), lain-lain agama (0.4%), tiada agama (0.7%) dan tidak diketahui status agama (1.0%) (<https://www.dosm.gov.my/v1>, n.d.). Data ini menunjukkan bahwa penduduk Malaysia memiliki keberagaman agama yang sangat tinggi meskipun begitu agama Islam merupakan agama dengan jumlah penganut terbanyak.

Berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan republik, Malaysia merupakan sebuah negara yang menggunakan sistem konstitusi-monarki. Sistem ini digunakan karena pemimpin tertinggi adalah raja. Raja memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga dan mempertahankan Agama Islam tetap berkembang dalam masyarakat yang multi agama dan etnis serta budaya.

Agama Islam memiliki posisi yang penting dalam masyarakat, namun setelah kedatangan penjajah British ke Tanah Melayu, pelbagai sistem pemerintahan dan dasar-dasar negara telah diubah menjadi sistem barat. Hal ini karena sejak masa kolonial tersebut penggunaan sistem pemerintahan inggris sebagai dasar utama negara Malaysia mulai dikembangkan, walaupun tidak sepenuhnya dilaksanakan karena masih terdapat pengaruh unsur agama Islam. Hukum Syariah masih digunakan hanya untuk wilayah pribadi dan keluarga saja.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa negara Malaysia telah menerapkan konsep sekularisme dalam pendidikan dan pemerintahan negara. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang tidak mengintegrasikan antara agama dan negara dalam sistem pemerintahan kerajaan Malaysia. Ini terdapat persamaannya dengan praktik yang dijalankan pada masa kolonial dulu dimana pemerintahan melakukan pemisahan antara agama dan negara. Khususnya dalam hal pendidikan dimana negara dan kerajaan mengembangkan ilmu pengetahuan yang hanya didasarkan pada sains moden secular (Azmi Aziz, 2011).

Sekularisme yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia juga terlihat dari bagaimana pemerintah memperlakukan permasalahan agama yang dipandang netral oleh negara, dalam hal bahwa pemerintah tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama, dengan kata lain negara tidak berpihak pada agama dan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menganut agama dan bebas menjalankan karena agama dipandang sebagai wilayah pribadi.

Fenomena diatas merupakan hal yang lumrah di setiap negara yang menganut sekularisme, dimana negara sekular akan menyamakan hak semua penduduknya sederajat, meskipun agama mereka berbeda-beda, dan juga tidak melakukan diskriminasi terhadap penduduk beragama tertentu. Hal inilah dapat dilihat dalam masyarakat kontemporer Malaysia, pemerintah meletakkan posisi yang sama antara warga negara penganut agama Islam maupun agama lain.

Sepintah pemberlakuan sama rata ini tidak berkesan tidak memberikan dampak negative, bagi negara pemberlakuan ini adalah normal adanya mengingat kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat Malaysia, namun bagi masyarakat Muslim yang menginginkan diperlakukan sesuai dengan keberadaan mereka sebagai muslim, merasa bahwa perlakuan ini melahirkan ketidakadilan.

Hal lain yang dikritisi oleh masyarakat muslim berdasarkan penelitian ini adalah, bahwa masyarakat muslim pada dasarnya tidak menginginkan sistem sekuler yang diterapkan di Malaysia, meskipun masyarakat tidak meminta pelaksanaan negara islam namun mereka menginginkan bahwa mayoritas perlu dipertimbangkan misalnya dalam pemilihan kepala negara, perlu mempertimbangkan dari kelompok muslim, yang saat ini kepemimpinan negara kebanyakan pemimpin yang berada di dalam pemerintahan, malah hakim pun mayoritas berasal dari non muslim. Dengan semakin sedikitnya jumlah muslim yang duduk dalam pemerintah maka lambat laun ajaran Islam akan semakin terpinggirkan. Dampak dari banyak Hakim di kalangan non muslim berdampak pada keputusan-keputusan persoalan yang dialami masyarakat muslim khususnya terkait dengan hukum Islam yang tidak sesuai. Dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat muslim.

Terdapat satu petikan yang telah diterjemahkan, mengatakan bahwa “negara ini telah ditetapkan untuk menjadi negara sekular oleh pengasas terdahulu. Hal ini karena ia terdapat perlembagaan sekular dan rakyatnya menikmati hak-hak asasi sekular seperti kebebasan beragama, tetapi asas itu semakin longgar dan makin diserang.

Murtad bukanlah sesuatu yang baru tetapi sekarang ia menjadi menonjol karena perkembangan islamisasi di negara sekuler ini” (Mohd Aizam bin Mas’od, 2015). Hal ini telah menjadikan sebagai sebuah bukti bahwa Malaysia telah melaksanakan konsep sekuler dalam pemerintahan negara. Hal ini yang membuatkan peneliti merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam dan lebih rinci lagi.

Sebagian masyarakat Malaysia mengatakan bahwa sekularisme tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks Malaysia, Malaysia tidak menyatakan bahwa Malaysia merupakan negara Islam tetapi dalam perlembagaan negara, agama resmi negara adalah Islam. Kekhawatiran pelaksanaan sekularisme akan berdampak terhadap daya tahan masyarakat Malaysia khususnya anak muda terhadap globalisasi yang dipandang akan mempengaruhi moralitas dan identitas nama muda, dalam hal ini agama adalah pertahanan terakhir bagi populasi penduduk yang beragama Islam dalam menghadapi globalisasi (Rusydi Alias, 2010).

Pada sisi lain, sekularisme dipandang sebagai salah satu wacana dan upaya untuk merusak dunia pendidikan bangsa Melayu. Sekularisme telah merubah cara pandang dan cara pemikiran masyarakat terhadap keutuhan institusi kekeluargaan yang menjadi pilar utama dalam pembentukan serta pembangunan masyarakat. Sekularisme akan berdampak secara jangka panjang pada terjadinya perubahan yang mengarah pada hilangnya identitas masyarakat muslim dan ketertarikan untuk menjalankan ajaran islam bagi generasi muda.

Tidak hanya itu, kebingungan di kalangan anak muda terjadi apakah mereka akan mengikuti aturan agama atau menjalankan peraturan pemerintah yang kadang saling bertentangan. Salah satu contoh yang adalah aturan pemerintah yang mengakomodir praktik homoseksual, dengan alasan bahwa orientasi seksual adalah hak individu yang harus dilindungi oleh negara, sementara dalam islam homoseksual jelas merupakan dosa besar dan dilarang.

Selain itu, dampak dari sekularisasi adalah keterbukaan masyarakat dalam mengakses media internet yang tanpa pengawasan dari pihak pemerintah. Informasi terbuka terkait dengan konten-konten yang mengarah pada pornography akan dengan sangat mudah diakses tanpa pembatasan. Tentu hal ini akan semakin memperparah dan memperburuk situasi masyarakat khususnya di kalangan anak muda yang perlu pengawasan dalam penggunaan internet dan media online. Pelaksanaan sekularisme ini akhirnya akan dikhawatirkan munculnya sikap masyarakat muslim

untuk merasa tidak perlu lagi menjalankan agama tidak mendapatkan dorongan untuk menjalan ajaran agama sebagaimana yang tertulis dalam alquran dan hadis. khususnya generasi millennial.

B. Pembahasan

1. Sejarah Sekularisme di Negara Islam

Kata sekular berawal dari pertengahan abad pertengahan zaman Renaissance, istilah tersebut telah digunakan di dunia Barat yang merujuk pada kebijakan khusus terhadap adanya pemisahan antara Gereja dengan Negara. Kata tersebut diambil dari bahasa Latin *Saeculum* yang memiliki dua konotasi yaitu Time (Masa) dan Location (tempat). Waktu menunjukkan *Now* atau *Present* (Sekarang) sedangkan *Location* (tempat) dinisbatkan kepada World (dunia). Dalam kamus *The New International Webster's Comprehensive Dictionary of the English Language*, mengartikan Secularism: terkait dengan keduniaan dan menolak nilai-nilai spiritual Sedangkan Secularize: proses penduniaan, proses untuk menuju sekular: perpindahan dari kesakralan menuju kesekuleran” (M. Syukri Ismail, 2014).

Perkataan *secular* yang berasal daripada bahasa latin *saeculum*, yang mengandung suatu makna yang ditandai dengan dua pengertian yaitu waktu dan tempat atau ruang. Secular dalam pengertian waktu merujuk kepada ‘sekarang’ atau ‘kini’, sedangkan dalam pengertian ruang merujuk kepada ‘dunia’ atau ‘duniawi’. Oleh itu, *saeculum* bermakna ‘zaman kini’ atau ‘masa kini’, dan zaman ini atau masa kini merujuk kepada peristiwa di dunia ini, dan itu juga bermakna ‘peristiwa-peristiwa masa kini’. Tekanan makna pada istilah sekular adalah diletakkan pada suatu waktu atau masa tertentu di dunia yang dipandang sebagai suatu *proses sejarah*.

Sekularisasi didefinisikan sebagai pembebasan manusia pertama daripada kungkungan agama yang mengatur rasionalitas. Hal ini bertujuan untuk “melepaskan bebas dunia ini dari cara pandang agama yang sempit, menolak segala pandangan alam (*worldview*) yang tertutup, menghapuskan semua mitos dan simbol-simbol dikultuskan”. Seterusnya, sekularisasi ini tidak hanya diterapkan dalam aspek politik dan sosial saja, namun juga meliputi aspek kebudayaan masyarakat. Hal ini karena sekularisasi juga mempunyai arti “hilangnya pengaruh agama terhadap simbol-simbol penyatuan kebudayaan” (Khalif Muammar A. Haris, 2020).

Al-Attas menegaskan bahwa “Visi dan perjuangan pembaruan Islam adalah gerakan yang kuat melawan kaum modernis dan postmodernis yang secara aktif

bergerak untuk mengubah segala sesuatu yang dianggap bertentangan dengan tuntutan masa kini, yang kini didorong oleh sekularisasi". Gerakan ini telah membawa banyak perubahan tetapi juga tidak berhasil memajukan orang-orang yang berpihak pada Barat. Menurutnya, "sekularisasi berarti pembebasan manusia dari belenggu agama dan kemudian dari belenggu metafisika yang mengatur pikiran dan bahasanya." (Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 2020).

Muhammad Tahir Azhary, dalam disertasinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul Negara Hukum mendefinisikan sekularisme sebagai "suatu paham yang ingin memisahkan atau menetralsir semua bidang kehidupan seperti politik, kenegaraan, ekonomi, hukum, sosial budaya dan ilmu pengetahuan teknologi dari pengaruh agama atau hal-hal yang ghaib. Sedangkan sekularisasi, menurutnya adalah usaha atau suatu proses yang menuju kepada keadaan sekuler atau proses netralisasi dari setiap pengaruh agama dan hal-hal yang ghaib. Sekuler adalah sifat-sifat yang menunjukkan kepada sesuatu keadaan yang telah memisahkan kehidupan duniawi dari pengaruh agama atau hal-hal yang ghaib (M. Syukri Ismail, 2014).

Selanjutnya, negara Islam yang paling awal menerima ideologi sekuler dalam pemerintahannya adalah Turki, sebelum pecahnya perang dunia II, ada beberapa konsep negara sekuler, agama, hukum, pendidikan dan ekonomi yang diperkenalkan dalam pemerintahan negara ini. Hal ini terjadi karena meluasnya penyebaran ideologi sekularisme sehingga dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek seperti politik, konstitusi, pendidikan dan kebudayaan. Namun, tidak semua Muslim atau individu Muslim yang setuju dengan doktrin ini diterapkan dalam pembentukan dan pendidikan negara.

Namun doktrin tersebut malah ditentang oleh Turki sendiri, hal ini dikarenakan ada doktrin yang coba diterapkan di negara tersebut sangat tidak cocok untuk masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Namun, pada saat yang sama, mereka juga didasarkan pada kesadaran yang berbeda dan sepakat bahwa "Islam bukan hanya keyakinan bagi individu yang memiliki hati, tetapi Islam adalah dasar dari semua sistem sosial, dan agama Islam". Merupakan agama yang berperan penting dalam mempersatukan setiap pranata sosial yang ada, sehingga mendapat berbagai godaan yang berusaha memisahkan berbagai bidang dengan agama (Imron Mustofa, 2016).

Turki pada awal pembentukannya terjadi revolusi budaya dan negaranya, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan sebuah negara.

Hal ini dikarenakan terbentuknya sekularisme di Turki yang disebabkan oleh Mustafa Kemal telah menggulingkan sistem khilafah sebelumnya. Setelah menghapus khilafah, politik Kemalisme menghapus institusi syariah, syariah menjadi benteng terakhir yang tersisa dari sistem keagamaan tradisional. Hal ini semakin kuat ketika Kemalis menutup sekolah-sekolah madrasah yang sudah ada sejak lama. Selain itu, Kemalis juga melarang penggunaan pakaian yang dianggap pakaian keagamaan di tempat umum dan mendorong penggunaan pakaian yang relatif modern dan berpenampilan barat, serta tulisan Arab diganti dengan tulisan Latin. Hal ini dalam rangka menghapus sistem pemerintahan yang telah digunakan pada era Usmani.

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang mayoritas beragama Islam dan dipandang sebagai negara Islam. Keduanya juga merupakan anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Berdasarkan prinsip-prinsip OKI tersebut, semua negara anggota mendukung konsep dan orientasi Islam moderat serta menolak ideologi dan elemen yang disebut ekstremisme atau ekstremisme. Melalui definisi ini, konsep Islam telah mengajarkan umatnya dalam berbagai aspek termasuk dalam aspek moderasi dan moderasi dalam konteks sosial politik di kedua negara ini secara keseluruhan.

Dalam konteks di atas dapat dipahami bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan bagian dari negara yang mayoritas beragama Islam, namun terdapat pemahaman sekuler dalam sistem pemerintahannya. Hal ini dikarenakan doktrin tersebut telah berkembang sejak penjajahan Inggris dan Belanda terhadap masing-masing negara tersebut. Kedua negara memiliki sistem pemerintahan yang demokratis. Hal ini dikarenakan demokrasi sendiri agak dekat dengan konsep syura atau musyawarah dalam Islam. Oleh karena itu, gerakan politik yang memperjuangkan Islam berdasarkan jalur demokrasi dianggap moderat.

2. Sekularisme dalam Politik Di Malaysia

Malaysia telah mengembangkan pemerintahan dengan menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Demokrasi adalah sistem politik modern yang didasarkan pada pemerintahan yang didasari dari, oleh dan untuk masyarakat. Demokratisasi, di sisi lain, adalah proses yang melibatkan perubahan sistem oleh beberapa orang, ke aturan massa yang lebih luas (masyarakat). Dengan demikian, dalam demokrasi terdapat mekanisme, saluran dan lembaga yang memungkinkan berlangsungnya sistem pemerintahan oleh banyak orang. Namun, sistem demokrasi tidak memonopoli semua itu. Sebab, sistem pemerintahan otoriter dan campuran juga,

seperti Malaysia di bawah pemerintahan Barisan Nasional (BN), memiliki unsur-unsur tersebut. Namun, ada kendala dan manipulasi yang menyebabkan sistem akhirnya hanya didominasi oleh sebagian kelompok (Nor Faezah Arshad, 2018).

Berdasarkan kerangka negara-bangsa, agama merupakan salah satu unsur sekunder dan hanya bersifat nominal, sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Status quo dalam konstitusi dianggap sah dan menjadi pedoman bagi semua warga negara. Pedoman ini dianggap mewakili pendapat mayoritas karena perumusan ideologi negara dan konstitusi melalui sesi konsultasi dan diskusi serta debat yang melibatkan pimpinan utama saat itu. Karena itu, munculnya hasil-hasil yang membentuk konsensus nasional yang menjadikan status-quo nasional yang dianggap mewakili kepentingan umum dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Akibatnya, karena prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh kaum nasionalis didasarkan pada kerangka Barat, mereka lebih cenderung menerapkannya pada sekularisme dengan dalih memperhatikan kepentingan non-Muslim di negara tersebut. Hal ini karena konsep negara-bangsa memberikan elemen yang lebih universal dan demokrasi berbasis sekularisme seperti yang dipraktikkan di Barat.

Berdasarkan pernyataan di atas, Malaysia merupakan salah satu negara Islam yang menganut sistem sekuler dalam pemerintahannya. Namun sekularisme yang dipraktikkan di Malaysia tidak seperti sekularisme di Amerika Serikat atau negara-negara Eropa. Malaysia menggunakan sistem sekularisme dalam hal-hal tertentu. Ini tidak menentang agama dalam pemerintahannya. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang sepenuhnya sekuler seperti di negara-negara barat. Namun, hal ini karena selama pendudukan Inggris di Malaya, mereka telah memperkenalkan beberapa sistem yang memiliki unsur sekularisme yang memisahkan agama dan Negara (Mohd Luqman Hakim bin Mohd Nazri, 2021).

Maka dalam konteks ini, ada persepsi seperti yang dikemukakan oleh Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama Malaysia, bahwa pemisahan agama dari politik adalah ideologi universal karena situasi ini dapat menjamin persatuan dan kerukunan antar semua orang dari berbagai agama dan etnis. Dengan demikian, posisi nominal Islam dalam konstitusi dianggap universal dan menggambarkan konsep moderasi. Dalam konteks Malaysia, jika konstitusi menempatkan hukum Syariah di bawah kendali konstitusional, atau membatasinya, itu dianggap cukup untuk menjamin integritas Islam di negara itu. Dengan status hukum ini, pemerintah dapat

mempromosikan kegiatan keagamaan dan menggunakan dana pemerintah untuk mendanainya (Ahmad Tarmizi bin Sulaiman, 2021).

Menurut Rusdi Alias, “konstitusi Malaysia telah menempatkan Islam sebagai agama resmi Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam perlu dipertahankan dalam konteks masyarakat majemuk di Malaysia. Inilah yang terjadi di negara kita Malaysia ketika supremasi Islam masih dominan. Namun, pemilihan umum ke-14 baru-baru ini (GE 14) telah membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan negara. Setelah GE ke-14, banyak tuntutan non-Muslim di Malaysia yang melibatkan posisi Islam sebagai agama resmi mulai ditentang dan status quo orang Melayu mulai ditantang. Situasi itu semakin diperparah dengan skenario perubahan kekuatan politik pasca GE ke-14 yang melihat keberanian non-Muslim, khususnya DAP, yang begitu vokal memimpin gerakan reformasi. Tuntutan demi desakan non-Muslim untuk menuntut persamaan hak seperti Interfaith Council (IFC).” (Rusydi Alias, 2010).

Melayu yang beragama Islam berdasarkan konteks di atas, terlihat bahwa Malaysia tidak menerapkan negara Islam. Namun karena Malaysia adalah masyarakat mayoritas Muslim dan terdapat berbagai suku di dalamnya, Malaysia menggunakan konsep yang komprehensif dalam pemerintahannya untuk bersikap adil. Dapat dilihat bahwa dalam konstitusi Malaysia, Malaysia merupakan negara yang menggunakan konsep Islam. Namun, umat Islam tetap dapat menjalankan perintah Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, masyarakat non-Muslim bebas menjalankan agamanya masing-masing di Malaysia (Ahmad Tarmizi bin Sulaiman, 2021).

Paling tidak pendapat Tunku Abdul Rahman ada benarnya, dalam konstitusi nasional, urusan-urusan keislaman telah diserahkan kepada pemerintah negara bagian yang diurus di bawah Dewan Agama Islam Negara yang merupakan Badan Hukum. Hukum Islam telah diundangkan dan dikodifikasikan dalam hukum negara secara keseluruhan. Selain itu, ada kegiatan Islam yang dipromosikan dan didanai oleh pemerintah federal melalui Departemen Agama Islam Malaysia (JAHEM) yang kemudian diubah menjadi Departemen Pengembangan Islam Malaysia (JAKIM). Pada dasarnya hal ini tidak dapat dipersoalkan karena sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang yang ada. Bahkan, integritas Islam telah diperkuat melalui jalur administratif dan birokrasi yang terstruktur dan kebijakan penerapan Islam telah menjadi kebijakan eksklusif pemerintah sejak tahun 1980-an. Ini diikuti

oleh pendirian lembaga-lembaga Islam modern seperti Universitas Islam Internasional Malaysia, Perbankan Islam dan Asuransi Islam atau takaful. Pendirian ketiga lembaga tersebut sebenarnya telah melalui jalur hukum perdata, yaitu pengesahan suatu undang-undang yang disahkan di DPR. Akibatnya, kebijakan Islamisasi ini telah menunjukkan Islam sebagai 'Islam sipil' atau Islam universal (A Rahman Tang Abdullah, 2017).

Selanjutnya, menurut A Rahman Tang Abdullah, ia menyatakan bahwa “untuk memungkinkan penerapan hukum Islam yang lebih luas, Undang-Undang Hukum Perdata 1956 perlu diubah yaitu Pengadilan Sipil harus diberdayakan untuk mendirikan dan sesuai dengan Common Law Malaysia yang dapat dimodifikasi dengan mengacu pada hukum Islam. Namun, hingga saat ini, yurisdiksi pidana masih terikat oleh Undang-Undang Peradilan Syariah (Peradilan Pidana) 1965 (Amandemen) 1984, yang membatasi yurisdiksi Peradilan Syariah. Undang-undang Pengadilan Syariah (Yurisdiksi Pidana) (Amandemen) 1984 membatasi yurisdiksi Pengadilan Syariah untuk menjatuhkan hukuman penjara tidak lebih dari tiga tahun atau denda tidak lebih dari lima ribu ringgit (RM 5,000.00) atau cambuk tidak lebih dari enam pukulan atau kombinasi dari hukuman apapun itu” (Abdul Monir Yaacob, 2009). Hal ini, menyebabkan kedudukan peradilan perdata dan peradilan syariah tidak seimbang di samping putusan peradilan syariah yang terbatas pada umat Islam. Selain itu, ada juga kasus-kasus yang membutuhkan rujukan Islam sebagai inti dalam menghadapi persidangan di pengadilan perdata.

3. Sekularisme dalam Sistem Pendidikan di Malaysia

Sebelum kedatangan penjajah Inggris, Malaysia menggunakan sistem pendidikan tradisional Melayu. Sistem pendidikan Melayu tradisional dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang akan diperoleh dengan belajar dari guru dan buku.

Mohd Luqman Hakim menyatakan bahwa “pendidikan formal sebelum kedatangan Inggris tidak terlalu rapi dan tidak terlalu sistematis. Hal ini dikarenakan belum adanya sumber referensi dan silabus pendidikan yang seragam. Pelajaran yang dikembangkan saat melalui metode menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, menghafal doa dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Meski begitu, para guru yang mengajar saat itu memiliki tingkat pengetahuan yang sangat tinggi di bidangnya masing-masing. Pembelajaran yang diberikan di sekolah tidak memiliki keseragaman, artinya setiap sekolah dapat mengembangkan sendiri bahan ajar sesuai dengan

kebutuhan dan permasalahan mereka masing-masing. Salah satu ciri khas dari pendidikan tradisional adalah dengan hanya meng fokus pada pengajaran agama dan tidak mengakomodir pengetahuan umum dan sosial” (Mohd Luqman Hakim bin Mohd Nazri, 2021).

Disamping sistem tradisional, Malaysia juga mengembangkan sistem pendidikan pondok (dayah). Konsep pendidikan pondok (dayah) dikatakan telah dimulai di Malaysia pada abad kesembilan belas. Kata pondok berasal dari bahasa arab funduq yang berarti rumah kos atau hotel. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa sistem pendidikan pondok (dayah) berasal dari Sumatera, Indonesia atau Pattani di Thailand Selatan. Pendapat lain juga menyatakan bahwa bentuk pendidikan pondok (dayah) berasal dan dipengaruhi oleh sistem pendidikan dari Mekkah pada waktu itu. Hal ini dikatakan karena metode belajar di pondok (dayah) memiliki kesamaan dengan yang ditemukan di Mekkah dan selain itu guru-guru pondok (dayah) telah mengunjungi Mekkah untuk memperdalam ilmu agamanya. Dalam sistem pendidikan pondok (dayah), rumah guru atau mesjid akan dikelilingi oleh gubuk-gubuk kecil (tempat tinggal beberapa siswa) atau asrama (untuk sejumlah besar siswa)” (Ramli Saadon, Khairi Ariffin, 2016).

Saat ini diperkirakan ada lebih dari 100 lembaga pesantren yang telah berdiri di Semenanjung Malaysia. Di Kelantan sendiri, ada 39 pesantren unggulan. Sementara di Kedah, Perlis, dan Penang, ada hampir 30 pesantren yang beroperasi di negara bagian itu. Ada juga beberapa pesantren yang didirikan di negara bagian di bagian selatan Semenanjung seperti di Johor, Negeri Sembilan dan Melaka. Namun, jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan pondok-pondok di pantai utara dan timur. Di Terengganu, misalnya, ada sekitar dua belas pondok pesantren seperti Pondok Darussalam, Pondok Paku, Pondok Lubuk Pandan dan lain-lain.

Kekhasan dari model pendidikan berbasis pondok adalah biasanya dibentuk sendiri komunitas dalam mas tersendiri yang dikembangkan di atas sebidang tanah milik guru atau tanah wakaf atau dibeli bersama oleh penduduk desa. Sementara itu, rumah guru biasanya dibangun di tengah area untuk memudahkan guru memantau setiap aktivitas yang dilakukan siswa. Selain itu, di dekat rumah guru akan dibangun gedung atau tempat belajar dan tempat shalat berjamaah untuk memudahkan siswa melakukan ibadah bersama guru. Di sekitar kawasan akan didirikan gubuk-gubuk tempat tinggal siswayang saling berdekatan antara satu gubuk dengan lainnya yang

hanya berjarak 1,5 meter” (Masyhurah Mohamad Rawi, Harun Baharudin, Maimun Aqsha Lubis, 2015).

Setelah kedatangan Inggris di Malaya, Inggris memperkenalkan dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan sekuler dan pendidikan Kristen. Menurut Azmi Aziz, sistem pendidikan sekuler adalah “sistem pendidikan resmi dan utama yang dibawa oleh Inggris. Sedangkan pendidikan agama Kristen tidak dibawa oleh pemerintah kolonial Inggris tetapi dibawakan oleh misionaris Kristen secara pribadi. Akibatnya, sejak kehadiran Inggris, Malaya memiliki dualisme pendidikan, yaitu pendidikan sekuler dan pendidikan agama. Setelah Malaysia merdeka pada 31 Agustus 1957 dan berdirinya Malaysia pada 16 September 1963, kemajuan pesat dalam hal spiritual dan material telah dicapai oleh Malaysia. Setiap perkembangan pesat dari semua sudut menarik banyak pandangan dari seluruh dunia. Malaysia tidak bisa lepas dari pengaruh perkembangan internasional baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Kebangkitan Islam yang dikenal sebagai kebangkitan Islam di tingkat internasional juga menyebar ke Malaysia melalui siswa yang dikirim untuk belajar di luar negeri.” (Azmi Aziz, 2011).

Pendidikan sekuler dimulai sejak penjajah menaklukkan Perbukitan Selat melalui sistem pendidikan yang telah diperkenalkan oleh pemerintah kolonial, yaitu penjajah Inggris. Namun, sistem pendidikan ini menolak peran agama baik dari segi (kurikulum dan ekstrakurikuler maupun dari segi manajemen dan pemerintahan. Hal ini menyebabkan paham sekularisme mulai tumbuh dan mempengaruhi pemikiran masyarakat di Malaysia hingga sekarang. Oleh karena itu, jika melihat remaja atau anak muda masa kini, mereka terpengaruh oleh dunia barat dan kurang tertarik dengan hal-hal yang bersifat ilmu agama, bagi mereka mempelajari ilmu agama membatasi kesempatan bagi lulusan sekolah agama.

Disamping pendidikan berbasis pondok terdapat pula sistem pendidikan vernakular. Sekolah vernakular Melayu adalah sistem pendidikan formal pertama yang diterima oleh orang Melayu tanpa memandang status dan status ekonomi. Kurikulum sekolah bahasa Melayu ini lebih luas daripada sekolah pondok yang ada pada waktu itu. Namun, untuk mendorong masyarakat Melayu bersekolah dengan sistem vernakular, berbagai silabus akan diterapkan di sekolah vernakular Melayu seperti Bacaan; Menulis; Ejaan; Menulis; Ilmu Akuntansi; Pelatihan Fisik dan Ilmu

Pengetahuan Alam. Kurikulum sekolah vernakular ini bertujuan agar orang Melayu bisa membaca, menulis, dan berhitung.

Selain itu, menurut Siti Nur Ezzati, pendidikan saat ini “silabus yang diajarkan memiliki sistem pembelajaran sekolah bahasa Melayu. Selain itu juga untuk memperbaiki sistem pendidikan dengan menyediakan jadwal mengajar yang terstruktur, yaitu sesi pagi untuk pelajaran akademik dan sesi sore untuk pembelajaran agama. Meskipun sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh Inggris memiliki banyak kekurangan tetapi sistem ini telah membuka jalan bagi pendidikan formal dan sistematis bagi orang Melayu. Berdasarkan itu, dalam sistem ini masih ada pendidikan agama, tetapi pelajaran agama diajarkan sesuai dengan usia siswa. Hal ini berbeda dengan sistem pondok di mana pelajaran yang diajarkan tidak terlalu konsisten dengan siswa” (Siti Nur Ezzati Binti Mohammad Shukri, 2021).

Berdasarkan perkara di atas, dapat dikatakan “perkembangan dua sistem saling mempengaruhi satu sama lain. Pendidikan formal yang diamalkan oleh sekolah vernakular dengan kurikulum yang lebih meluas dan praktikal telah menarik perhatian tokoh-tokoh pendidik agama untuk mengemaskan sistem pendidikan Islam dari Sekolah Pondok kepada Pengajian Madrasah. Sistem madrasah ini diperkenalkan di Tanah Melayu oleh Syeikh Tahir Jalaluddin dan Syeikh Muhammad Abduh yang mendapat pendidikan tinggi di Timur Tengah. Tokoh-tokoh agama dari Kaum Muda inilah yang memberikan kesedaran kepentingan pendidikan kepada masyarakat Melayu serta menggalakkan anak-anak Melayu pada ketika itu untuk bersekolah – tidak kira di Madrasah mahupun Sekolah Vernakular” (Izzati Mohd Yusop, 2014).

Menurut Nur Syafiqah, “pendidikan Vernakular Melayu memiliki mutu yang rendah. Hal ini disebabkan karena fokusnya hanya pada dasar-dasar seperti membaca, menulis, dan mempelajari dasar-dasar keseimbangan. Pembelajaran seperti itu tidak akan diperoleh di sekolah menengah Melayu. Selanjutnya, pengembangan sekolah ini terbatas pada sekolah dasar saja. Hal ini karena ada unsur perbedaan antara kelas elit dan rakyat jelata dalam pendidikan vernakular Melayu dimana perbedaan ini sangat jelas. Namun, bagi masyarakat biasa, tujuan pendidikan Melayu adalah menjadikan mereka petani dan nelayan yang lebih baik dari orang tua mereka sebelumnya. Meskipun demikian, pendidikan daerah tidak terbatas pada mata pelajaran tertentu saja, tetapi masih ada pendidikan agama juga” (Nur Syafiqah Binti Zaini, 2021).

Di samping itu, menurut Izzati bahwa “kedua-dua sistem pendidikan yang telah diperkenalkan menunjukkan perkembangan yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Namun pendidikan formal yang dilaksanakan oleh sekolah vernakular dengan kurikulum yang lebih meluas dan praktikal. Hal ini telah menarik perhatian tokoh-tokoh pendidik agama untuk mengemaskan sistem pendidikan Islam dari Sekolah Pondok kepada Pengajian Madrasah.

Sistem madrasah ini diperkenalkan di Tanah Melayu oleh Syeikh Tahir Jalaluddin dan Syeikh Muhammad Abduh yang mendapat pendidikan tinggi di Timur Tengah. Tokoh-tokoh agama dari Kaum Muda inilah yang memberikan kesadaran tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat Melayu serta mendorong anak-anak Melayu pada ketika itu untuk bersekolah baik di Madrasah mahupun Sekolah Vernakular” (Izzati Mohd Yusop, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendidikan di Malaysia saat ini masih menggunakan sistem vernakular ini. Namun pada saat yang sama, banyak sekolah agama telah dibangun dan mendapat dukungan dari pemerintah. Untuk itu, pemerintah telah memberikan berbagai bentuk bantuan kepada sekolah-sekolah agama seperti buku-buku yang digunakan selama pembelajaran, memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan dan memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Namun, di universitas juga banyak jurusan agama yang terbuka bagi lulusan sekolah agama. Dalam konteks ini, kebutuhan akan guru agama juga semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sekuler dalam pendidikan di Malaysia semakin menurun meskipun masih ada sistem sekuler. Tapi, itu untuk membuat sistem pendidikan di Malaysia lebih sistematis. Meski begitu, dalam sistem ini masih ada sisi positif yang bisa diperoleh masyarakat dari pendidikan ini

C. Kesimpulan

Malaysia adalah negara yang mayoritas beragama Islam. Namun dalam konstitusi nasional, Malaysia tidak mengakuinya sebagai negara Islam. Tidak dapat disangkal bahwa pada masa pendudukan Inggris di Malaya, Malaysia menganut sistem pemerintahan yang sekuler. Oleh karena itu, Malaysia menggunakan konsep pemerintahan yang demokratis. Sistem demokrasi diperkenalkan oleh Inggris. Konsep ini memiliki unsur sekuler, namun para pemimpin Malaysia tetap mempertahankan unsur Islam dalam konsep ini. Hal ini karena dalam sistem demokrasi itu sendiri

terdapat unsur Islam seperti musyawarah dalam menentukan suatu hal. Hal ini akan menimbulkan konsensus antar ras dan berbagai kelompok masyarakat tanpa membedakan ras, agama dan suku di Malaysia.

Faktor yang menyebabkan Malaysia memilih menjadi negara sekuler adalah ketika Malaysia ingin menjadi negara yang merdeka. Hal ini menyebabkan Malaysia harus mengikuti semua kesepakatan yang telah ditetapkan oleh penjajah Inggris saat itu. Inilah penanda awal masuknya gagasan sekularisme dan falsafah pemisahan antara agama dan negara ke dalam dunia Melayu, khususnya Malaya, yang kemudian saya terapkan terus menerus dalam sistem administrasi sosial dan konstitusi negara. bangsa Malaysia sampai sekarang. Meski demikian, para pemimpin Malaysia telah membuat kebijakan pembatasan undang-undang yang melibatkan agama untuk diintervensi oleh Raja. Meski begitu, masih ada undang-undang yang memiliki unsur sekuler seperti perzinahan, kejahatan dan penyiksaan masyarakat di Malaysia.

Sekularisme juga diterapkan dalam pendidikan, pada masa penjajahan Inggris di Malaya mereka telah membuat silabus mata pelajaran yang berhubungan dengan akademik saja tanpa ada mata pelajaran yang berhubungan dengan agama. Jika orang tua ingin anaknya belajar agama, mereka harus mencari guru agamanya sendiri. Hal ini dikarenakan sekolah tersebut tidak memiliki ilmu agama. Namun saat ini, pelajaran agama sudah masuk dalam silabus pendidikan. Para pemimpin Malaysia juga telah menyalurkan bantuan ke sekolah-sekolah agama di seluruh Malaysia. Hal ini untuk meningkatkan standar pendidikan agama di Malaysia.

Setelah Malaysia merdeka, pemerintah harus menerapkan sistem sekolah yang memiliki fungsi berbeda. Hal ini disebabkan penguatan sistem pendidikan yang lebih sistematis. Namun di sisi lain, sekolah memegang peranan penting karena sekolah dapat membentuk moral, kepribadian dan meningkatkan integrasi dalam masyarakat guna melahirkan masyarakat yang berwawasan dan memiliki intelektualitas yang tinggi. Pada saat yang sama, sekolah juga dipandang sebagai cara yang paling tepat untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam meningkatkan posisi orang Melayu dan memberikan kesempatan kepada generasi Melayu yang akan datang untuk menikmati hak istimewa orang Melayu sebagaimana tercantum dalam konstitusi nasional. Jadi di sini, upaya yang dilakukan harus seimbang antara kedua faktor tersebut, meski terkadang pengorbanan harus dilakukan atas nama persatuan dan integrasi ras.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rahman Tang Abdullah, A. M. S. (2017). Kontekstualisasi Islam dari Perspektif Moderasi, Sekularisme dan Ekstrimisme dalam Proses Kemerdekaan Indonesia dan Malaysia. *Perspektif: Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, Vol 9 No 2.
- Abdul Monir Yaacob. (2009). Pelaksanaan Perundangan Islam di Malaysia: Satu Penilaian. *Jurnal Fiqh*, Vol. 6 (20).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22452/fiqh.vol6no1.1>
- Ahmad Tarmizi bin Sulaiman. (2021). *Wawancara Ahli parlimen*.
- Azmi Aziz, and M. K. M. (2011). Transisi penting sistem berkerajaan di Alam Melayu: kes Malaysia. *UKM Journal Article Repository*, No. 2 (201).
- Deddy Mulyana. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Rosda Karya.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.
<https://www.dosm.gov.my/v1>. (n.d.).
- Imron Mustofa. (2016). Turki Antara Sekularisme dan Aroma Islam; Studi atas Pemikiran Niyazi Berkes. *El-Banat*, Vol. 6 No.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54180/elbanat.2016.6.1.50-62>
- Izzati Mohd Yusop. (2014). Impak kolonial terhadap pendidikan orang Melayu. *Jurnal Pendidikan*, Vol 1 (201).
- Khalif Muammar A. Haris. (2020). *Islam dan Sekularisme, Terjemahan Syed Muhammad Naquib Al-Attas*. Pusat Pengajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Raja Zarith Sofiah (RZS-CASIS).
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia.
- M. Syukri Ismail. (2014). Kritik Terhadap Sekularisme (Pandangan Yusuf Qardhawi). *Kontekstualita*, Vol. 29, N.
- Masyhurah Mohamad Rawi, Harun Baharudin, Maimun Aqsha Lubis, S. A. R. (2015). Institusi Pondok dalam Sistem Pendidikan Islam di Malaysia. *Jurnal Pendidikan*, Vol 1 (201).
- Mohd Aizam bin Mas'od. (2015). *Diskusi Isu Akidah dan Pemikiran Semasa di Malaysia*. Syah Alam.
- Mohd Anuar Ramli. (2013). FENOMENA AL-TASYABBUH (PENYERUPAAN) DALAM SAMBUTAN PERAYAAN MASYARAKAT MAJMUK DI MALAYSIA. *Jurnal Syariah*, Vol. 21 No.
- Mohd Luqman Hakim bin Mohd Nazri. (2021). *Wawancara Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia*.
- Nor Faezah Arshad. (2018). *Gelombang Politik Baharu di Malaysia*. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Nur Syafiqah Binti Zaini. (2021). *Wawancara Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia*.

- Ramli Saadon, Khairi Ariffin, I. S. (2016). Perkembangan Pendidikan orang Melayu di Malaya sebelum kemunculan Western-Type-Education. *Perspektif: Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, Vol 8 No 2.
- Rusydi Alias. (2010). *Pemikiran al-Banna dan ideologi barat: pertembungan dua agenda*. Ikatan Muslim Malaysia.
- Safrihsyah Syarif, F. M. Y. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Ushuluddin Publishing.
- Siti Nur Ezzati Binti Mohammad Shukri. (2021). *Wawancara Pelajar Sekolah Menengah Agama*.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (2020). *Islam dan Sekularisme*. Pusat Pengajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Raja Zarith Sofiah (RZS-CASIS).